

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kaderisasi di organisasi manapun merupakan urat nadi bagi sebuah organisasi. Kaderisasi adalah proses penyiapan sumber daya manusia (SDM) agar kelak mereka menjadi pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih baik. Mengutip Koiruddin (2004:113), dalam pengkaderan ada dua persoalan yang penting. Pertama, bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan kemampuan baik keterampilan maupun pengetahuan. Kedua, adalah kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia (SDM) organisasi dan terutama dikhususkan pada anggota yang masih berusia muda.

Terkait dengan point pertama dari uraian di atas maka pembelajaran dengan prosedur maupun pengelolaannya merupakan suatu kebutuhan yang mutlak untuk dapat meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan kader. Salah satunya adalah dengan menerapkan suatu model tertentu dalam pengkaderan. Penggunaan model pengkaderan ini diharapkan dapat menghasilkan kader yang mampu menghadapi berbagai tantangan maupun perubahan zaman. Organisasi dalam hal ini partai politik dalam era globalisasi harus adaptif dan akomodatif dalam membangun SDM anggotanya sehingga partai harus mampu menjadikan dirinya sebagai organisasi pembelajar mengingat jumlah partai politik di Indonesia yang relatif sangat banyak dan kompleksitas masalah masyarakat yang semakin meningkat sehingga persaingan antar partai tidak terelakkan.

Pemanfaatan merupakan salah satu kawasan teknologi pendidikan. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar, lebih lanjut dijelaskan oleh Seells dan Richey (1994:49-50) bahwa kawasan pemanfaatan adalah studi dan praktek tentang pelebagaan yang dapat terlibat dalam permasalahan perumusan kebijakan, prilaku politik, pengembangan organisasi, etika dan prinsip-prinsip ekonomi. mencakup juga penelitian tentang perilaku politik. Namun penelitian di bidang ini masih sangat sedikit. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini mengingat kehadiran partai politik pasca tumbanganya Orde Baru memberikan ruang yang lapang bagi masyarakat untuk berkompetisi memperebutkan kursi di lembaga legislatif. Isu-isu demokrasi dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) mencuat. Salah satunya adalah pengakuan hak-hak politik perempuan. Pengakuan hak-hak perempuan secara komprehensif telah dicapai ketika perserikatan bangsa-bangsa (PBB) mengadopsi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Woman* (CEDAW) di Wina tahun 1979. Bahkan Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU No. 7 tahun 1984. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 yang menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. (Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2004).

Di bidang politik, konvensi tersebut mengaturnya dalam 7 bab, yang antara lain memuat ketentuan: (1) jaminan persamaan hak untuk memilih dan dipilih, (2) jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasi memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat, (3) berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan, dan

(4) berpartisipasi dalam perkumpulan non pemerintahan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Sebelumnya, dengan UU no. 68 tahun 1956 pemerintah Indonesia telah pula meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan yang memuat aturan tentang: (1) wanita mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan pria tanpa suatu diskriminasi, (2) wanita akan dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua badan-badan pilihan umum yang didirikan oleh badan nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan pria tanpa suatu diskriminasi, (2) wanita akan mempunyai hak untuk menjabat jabatan umum dan menjalankan semua tugas-tugas umum yang ditetapkan oleh hukum nasional dengan syarat-syarat sama dengan pria tanpa suatu diskriminasi.

Semua aturan ini memperlihatkan bahwa tidak didapat satu peraturanpun yang mendiskriminasikan perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik maupun dalam kehidupan publik lainnya. Bahkan pada pemilihan umum tahun 2004 lalu keikutsertaan perempuan untuk dicalonkan dalam bidang legislatif diatur dalam UU no 31 pasal 65 tahun 2002 yang mengharuskan setiap partai politik peserta pemilu harus memberikan kuota 30% bagi anggota perempuan untuk dipilih.

Namun hasilnya memperlihatkan belum ada kemajuan yang signifikan. Ada asumsi yang menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan hanya sebagai kewajiban, dan perempuan lebih banyak digunakan sebagai alat untuk memobilisasi suara. Dari Tabel 1 berikut tampak hasil perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan yang diraih oleh perempuan.

**Tabel 1 Wakil Perempuan di DPRD Kota Medan Tahun 2004**

No	Partai Politik	Perempuan	Laki-Laki	Total
1	Golongan Karya	-	6	6
2	PDIP	1	5	6
3	PPP	-	4	4
4	Demokrat	1	5	6
5	PDS	1	4	5
6	PAN	-	5	5
7	PKS	1	8	9
8	PBR	1	2	3
9	Patriot Pancasila	-	1	1
	Jumlah	5	40	45

Sumber: KPU Propinsi Sumatera Utara Tahun 2004

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam legislatif seperti terlihat pada Tabel 1 di atas, di samping sistem politik yang tidak kondusif, juga disebabkan pengetahuan perempuan tentang hak-hak politik masih sangat rendah. Hal politik disini mencakup hak memilih dan dipilih, hak mengeluarkan pendapat, hak berorganisasi dan hak berdemonstrasi.

Dari hasil penelitian PSW-USU, (Manaf dkk:2001) menunjukkan bahwa 225 responden yang terdiri dari mahasiswa, perempuan karir, dan ibu rumah tangga tercatat hanya 35,3% di kalangan mahasiswa yang mengetahui hak-hak politiknya, 20% di kalangan perempuan karir dan 12% di kalangan ibu rumah tangga.

Rendahnya partisipasi politik juga terlihat dari hasil pengamatan yang ditulis dalam buku Kiprah Politik Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tahun 1999 menggambarkan bahwa minat kader muslimah masih rendah. Hal ini disebabkan kurangnya wawasan politik, belum dimilikinya persepsi yang utuh tentang pemberdayaan peran politik muslimah, mereka masih gamang melakukan aktivitas

politik, komunikasi dan koordinasi sistem partai yang belum efektif dan rendahnya dukungan sistem politik yang mampu menunjang aktivitas politik perempuan muslimah.

Sayangnya, akses dan kontrol perempuan terhadap hak politik yang masih rendahnya juga tidak terlepas dari adanya anggapan dari perempuan bahwa politik itu urusan laki-laki sehingga perempuan tidak tertarik pada politik. Selain itu rendahnya akses informasi serta tiadanya pendidikan politik yang diterima menyebabkan perempuan tidak bisa dan kesulitan mengekspresikan aspirasinya. Padahal kebijakan publik yang diputuskan dalam lembaga politik senantiasa terkait dengan kehidupan perempuan. Untuk itu kesadaran gender perempuan akan memperoleh “kekuatan” yang tumbuh dari dalam dan menjadi dasar untuk mengembangkan kemampuan perempuan untuk mengontrol sumber daya, menentukan apa yang dibutuhkan, dan dapat mengambil keputusan. Selain itu perempuan perlu mendapatkan pendidikan yang politik yang materinya berisi pemahaman politik secara praktis, hak-hak perempuan seperti hak pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hak politik, serta isu-isu gender dalam politik sedikitnya akan menyadarkan perempuan akan haknya.

Uraian di atas merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam lingkungan negara kita yang sangat bersifat fundamental, di mana laki-laki dan perempuan sebagai warga negara dalam pembangunan memiliki kedudukan yang sama. Dorongan dan penerimaan masyarakat terhadap partisipasi politik perempuan akan membuka peluang terhadap perluasan partisipasi politik.

Menghadapi perubahan dan paradigma tentang tuntutan peningkatan partisipasi politik perempuan yang sebenarnya, maka partai politik ini perlu melakukan

pengembangan organisasi dengan cara meningkatkan pengetahuan politik kepada kader-kader perempuannya melalui pengkaderan. Dengan pengkaderan diharapkan pengetahuan dan keterampilan politik kader perempuan dapat teruji dengan partisipasi politik kader perempuannya.

Penerimaan partisipasi politik perempuan tentunya memerlukan perubahan pola berpikir dan bertindak. PKS sebagai suatu organisasi dapat dipandang sebagai organisme yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya bahkan berfungsi sebagai wadah pendidikan politik bagi masyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan sebuah model pengkaderan yang dapat mendorong bahkan dapat meningkatkan partisipasi politik anggota perempuannya.

Jika pengkaderan yang dilakukan partai hanya terbatas pada transformasi nilai-nilai ideologis/keagamaan semata dan belum menunjukkan kepada usaha meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan politik bagi perempuan secara praktis, maka kader perempuan akan tetap menganggap partisipasi politik tidak penting. Dengan demikian pengkaderan hanyalah berfungsi untuk merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Jika hal ini terus berlangsung dalam pengkaderan maka akan dapat membentuk sikap yang negatif terhadap pengkaderan dan berimplikasi dengan rendahnya partisipasi politik.

Menurut Azwar (1988) sikap berkaitan dengan suatu situasi di mana seseorang berada pada keadaan untuk menentukan penerimaan atau penolakan kemauan serta suka dan tidak suka, penilaian dan reaksi menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap objek, orang, situasi dan mungkin aspek-aspek lain dunia, termasuk ide abstrak dan kebijaksanaan sosial.

Sikap positif terhadap pengkaderan akan menimbulkan penilaian dan reaksi yang menyenangkan sehingga kader akan memiliki kecenderungan tinggi terhadap partisipasi politik. Sebaliknya sikap negatif terhadap pengkaderan akan menimbulkan penilaian dan reaksi tidak menyenangkan sehingga kader akan memiliki kecenderungan rendah dalam partisipasi politik.

Pada dasarnya sikap yang terbentuk dalam pengkaderan akan memberi petunjuk bagaimana model pengkaderan yang berlangsung dalam pengkaderan. Apakah ada perbedaan isi maupun waktu dalam proses pembinaan atau memang terdapat perbedaan minat dalam membahas kejadian-kejadian politik antara kader laki-laki dan kader perempuan.

Sebuah kondisi sistem organisme yang sudah stabil pada gilirannya dapat melahirkan sikap (*attitude*), yakni keadaan kesiapan yang disimpulkan oleh organisme untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kualitas keadaan yang dipelajari dan diarahkan oleh motif pada tujuan tertentu. Pengetahuan politik didapatkan dari partai politik dengan tujuan dapat berpartisipasi, apakah dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, apakah aktif sebagai anggota partai politik, apakah memiliki jabatan dalam parpol hingga dicalonkan dalam legislatif. Dari sikap inilah lahir nilai, sebagai tujuan-tujuan umum yang mencakup pola-pola perilaku yang diatur. Karena itu Newcomb dalam Mulyana (2004) menegaskan bahwa salah satu fungsi sikap adalah memberi ungkapan yang positif terhadap nilai-nilai sentral yang dikehendaki oleh seseorang, dalam hal ini adalah kader dengan nilai-nilai sentral ideologi partai. Oleh sebab itu nilai-

nilai sentral ideologi partai sebaiknya harus mendukung terhadap partisipasi politik perempuan.

Sebagai calon pemimpin rakyat, kader diharapkan mampu melakukan komunikasi interpersonal. Sebab kemampuan komunikasi interpersonal dapat memperkokoh organisasi dan menunjang kader dalam partisipasi politik. Kemampuan komunikasi interpersonal adalah kemampuan untuk melakukan interaksi secara timbal balik. Dalam komunikasi ini membutuhkan pemahaman perasaan, empati dan mampu untuk melakukan interaksi secara timbal balik. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi interpersonal yang berlangsung dilakukan secara vertikal dan horizontal. Komunikasi interpersonal vertikal yaitu hubungan antara kader dengan organisasinya, komunikasi interpersonal yang membentuk koordinasi antara pimpinan dan anggota sehingga tujuan partai atau kinerja partai bisa diraih secara optimal. Selain itu, dalam pengkaderan kemampuan komunikasi interpersonal akan memudahkan bagi instruktur (pembina) untuk mengetahui kapasitas kader akan menyesuaikan model pengkaderannya. Saling memahami, terciptanya keterbukaan dan pengertian akan membentuk hubungan yang harmonis bagi pimpinan dengan anggota dan anggota dengan anggota. Cara ini akan dapat meminimalkan konflik internal bahkan dapat membuat organisasi menjadi lebih kuat.

Secara horizontal yaitu hubungan kader dengan massanya (konstituen). Kader adalah orang yang dianggap mampu untuk mengakomodir berbagai tuntutan atau aspirasi rakyat. Bagaimana mereka dapat mengakomodir tuntutan itu tentunya kader harus mampu memahami dan berempati terhadap masalah-masalah yang dihadapi

mereka sehingga rakyat memiliki kepercayaan dengan cara akan memilih mereka dalam pemilu legislatif.

Beberapa pertimbangan yang melatar belakangi penelitian ini memilih PKS sebagai objek antara lain: partai ini melakukan pembinaan (pengkaderan) yang sistematis serta berkesinambungan bagi anggota-anggotanya, selain itu perolehan suara pada pemilu legislatif 5 April 2004 pada tingkat nasional mengalami kenaikan sekitar 500%. Partai ini juga berhasil memenangkan di daerah pemilihan Jakarta, demikian juga untuk Kota Medan. Seperti yang tercantum pada Tabel 1 di atas, PKS mendapatkan 9 kursi untuk DPRD Kota Medan. Meningkatkan sangat signifikan dibandingkan dengan pemilu tahun 1999 yang hanya memperoleh 1 kursi.

Partai ini di samping secara kuantitatif mengalami perluasan dukungan dari masyarakat dan dari sisi kualitatif PKS memberikan wacana baru tentang perilaku budaya politik yang santun ketika berkampanye, berani, peduli dengan nasib orang-orang yang terpinggirkan, juga memiliki sikap kritis terhadap pemerintah.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: Hubungan Antara Sikap Terhadap Model Pengkaderan Dan Kemampuan Komunikasi Interpersonal Dengan Partisipasi Politik Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sebagai partai politik, model pengkaderan yang dilakukan PKS tidak hanya berfungsi untuk peningkatan kualitas sumber daya anggotanya. Tetapi lebih dari itu dapat memberikan kesempatan (peluang), akses kontrol dan peran politik bagi kader

perempuan. Sehingga dari pengkaderan dapat menumbuhkan sikap yang sangat positif bagi kader perempuan dan dapat meningkatkan partisipasi politik mereka. Namun kenyataannya partisipasi politik perempuan di partai ini yang masih rendah ditemukan adanya beberapa masalah yang dapat peneliti identifikasi sebagai berikut: (1) bagaimanakah partisipasi politik perempuan di PKS?, (2) apakah model pengkaderan dapat menumbuhkan partisipasi politik perempuan?, (3) bagaimana pengkaderan dilaksanakan? (4) bagaimana sikap kader perempuan terhadap model pengkaderan, (5) apakah komunikasi yang berlangsung dalam pengkaderan sudah efektif? (6) apakah kader memiliki kemampuan komunikasi interpersonal? (7) apakah komunikasi interpersonal dalam pengkaderan berlangsung dengan baik? (8) apakah kader senang dengan model pengkaderan? (9) apakah ada hubungan antara sikap pengkaderan dan partisipasi politik perempuan, (10) apakah ada hubungan antara kemampuan komunikasi interpersonal dengan partisipasi politik perempuan? dan (11) hubungan sikap terhadap model pengkaderan dan kemampuan komunikasi interpersonal dengan partisipasi politik?

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas maka penelitian ini dibatasi pada tiga variabel yakni dua variabel bebas yaitu sikap terhadap model pengkaderan dan kemampuan komunikasi interpersonal serta satu variabel terikat yaitu partisipasi politik perempuan. Variabel sikap terhadap model pengkaderan dibatasi pada kecenderungan kader untuk berperilaku (positif, negatif, dan netral) yang diukur dengan

struktur sikap (kognisi, afeksi dan konasi) yang meliputi aspek akidah, ibadah, akhlak, wawasan keorganisasian dan kepartaian.

Sedangkan variabel kemampuan komunikasi interpersonal dibatasi pada masalah kemampuan berinteraksi yang meliputi: kemampuan berempati, memiliki perspektif sosial dalam berkomunikasi, peka dalam berkomunikasi, memiliki pengetahuan situasi dan kondisi serta kemampuan memonitor diri dan mampu mengatasi kecemasan dalam berinteraksi.

Selanjutnya, variabel partisipasi politik perempuan dibatasi pada segala kegiatan baik di partai politik maupun usaha-usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat hubungan positif dan signifikan sikap terhadap model pengkaderan dengan partisipasi politik perempuan PKS Kota Medan?
- 2) Apakah terdapat hubungan positif dan signifikan kemampuan komunikasi interpersonal dengan partisipasi politik perempuan PKS Kota Medan?
- 3) Apakah terdapat hubungan positif dan signifikan antara sikap terhadap model pengkaderan dan kemampuan komunikasi interpersonal secara bersama-sama dengan partisipasi politik perempuan PKS Kota Medan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- 1) Hubungan positif dan signifikan sikap terhadap model pengkaderan dengan partisipasi politik perempuan PKS kota Medan.
- 2) Hubungan positif dan signifikan kemampuan komunikasi interpersonal dengan partisipasi politik perempuan PKS Kota Medan.
- 3) Hubungan positif dan signifikan sikap terhadap model pengkaderan dan kemampuan komunikasi interpersonal secara bersama-sama dengan partisipasi politik perempuan PKS Kota Medan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan secara praktis. Manfaat teoretis dari penelitian adalah:

- 1) Meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan pelatihan dan model pengkaderan.
- 2) Menambah inventarisasi penelitian pada kawasan pemanfaatan teknologi pendidikan di bidang implementasi dan kebijakan serta pendidikan politik yang berlangsung dalam masyarakat.
- 3) Menambah pengetahuan dalam pengembangan organisasi belajar dan komunikasi organisasi khususnya yang berkaitan dengan organisasi belajar dan komunikasi organisasi pada lembaga pendidikan dan pelatihan non formal.

Manfaat secara praktis adalah:

- 1) Pengembangan pendidikan politik bagi perempuan sehingga terwujud keadilan dan kesetaraan gender di bidang politik.

- 2) Memberi kontribusi bagi partai-partai politik khususnya partai PKS Kota Medan dalam pengkaderan perempuan sehingga dapat lebih meningkatkan kesadaran hak-hak politik perempuan. Di samping itu pengembangan model pengkaderan yang dapat menstimuli partisipasi politik khususnya partisipasi politik perempuan.